



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa arsip adalah sumber informasi yang autentik, utuh dan terpercaya, sehingga setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
5. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
6. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip yang dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
8. Klasifikasi adalah proses identifikasi katagori-katagori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokannya.

9. Klasifikasi keamanan arsip adalah katagori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
10. Klasifikasi akses arsip adalah katagori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
13. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
14. Sangat Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
15. Rahasia adalah klasifikasi informasi dari arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan kegiatan pemanfaatan/penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
17. Prosedur pengaksesan informasi publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otorisasi dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, adalah untuk:

- a. melindungi fisik dan informasi Arsip Dinamis dari kerusakan dan kehilangan sehingga kebutuhan akan ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, integritas, otentisitas dan reliabilitas Arsip tetap dapat terpenuhi; dan

- b. mengatur akses Arsip Dinamis agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

BAB II SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:

- a. Klasifikasi Keamanan Arsip;
- b. Pengamanan Arsip; dan
- c. Klasifikasi dan pengaturan akses Arsip.

Pasal 4

Sistem Klasifikasi Keamanan dan akses Arsip Dinamis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikategorikan menjadi:

- a. Biasa/terbuka;
- b. Terbatas; dan
- c. Rahasia.

Pasal 6

Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip Biasa/Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan Arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja pemerintahan daerah.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti *personal file*, dan penjurangan jabatan fungsional;
 - b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengadaan seperti dokumen pengadaan barang/jasa;

- c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pendidikan dan pelatihan seperti hasil evaluasi pengajar/ dosen/pembimbing, dan berkas perorangan mahasiswa;
- d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran, dan tuntutan ganti rugi;
- e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi hukum seperti putusan perkara pidana dan perdata, dan dokumen domisili hukum;
- f. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kerja sama seperti *Memorandum Of Understanding* (MoU);
- g. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kearsipan seperti daftar Arsip Vital dan daftar Arsip terjaga.

Pasal 8

- (1) Arsip Dinamis yang termasuk ke dalam kategori Arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan Arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang luas hingga mengganggu kinerja pemerintahan daerah.
- (2) Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kepegawaian seperti hasil pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai, perceraian pegawai, disiplin pegawai;
 - b. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan kerumahtanggaan seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, rancang bangun gedung;
 - c. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan auditor internal dan eksternal, laporan hasil pemeriksaan auditor independen;
 - d. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi hukum seperti dokumen kekayaan intelektual, dan kasus/ sengketa hukum;
 - e. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi hasil penelitian, pengembangan dan pendayagunaan teknologi; dan
 - f. Arsip Dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi kearsipan seperti daftar Arsip Vital.

Bagian Ketiga Pengamanan Arsip Dinamis

Pasal 9

- (1) Pengamanan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dengan melaksanakan pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasi sesuai dengan tingkat Klasifikasi.
- (2) Pengamanan fisik Arsip Dinamis maupun informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya melalui penyimpanan dan penyampaian.

Paragraf 1

Penyimpanan Arsip Dinamis

Pasal 10

Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan meliputi pemasangan kamera pengawas/*camera surveillance*, kunci pengamanan ruangan, dan media simpan Arsip.

Pasal 11

- (1) Media simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas sarana perangkat keras/*hardware* dan perangkat lunak/*software*.
- (2) Perangkat keras/*hardware* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana penyimpanan Arsip konvensional berupa rak Arsip/*filing cabinet* untuk menyimpan Arsip Biasa/Terbuka dan Terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk Arsip Rahasia;
 - b. sarana penyimpanan Arsip media baru berupa lemari Arsip sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi; dan
 - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat Klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak/*software* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. elektronik file daftar Arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - b. aplikasi pengelolaan Arsip aktif dan inaktif.

Paragraf 2

Penyampaian Arsip Dinamis

Pasal 12

- (1) Penyampaian Arsip Dinamis Klasifikasi Rahasia dilakukan dengan menggunakan amplop rangkap 2 (dua) tertutup.
- (2) Amplop luar tertulis penerima surat, alamat, nomor surat dengan kode dan stempel Rahasia (R).
- (3) Amplop dalam tertulis penerima surat, alamat, dan nomor surat dengan kode Rahasia (R).

Paragraf 3

Pengelola Arsip Dinamis

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan oleh Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip.
- (2) Pengangkatan Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II.
- (2) Pengelola Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada di unit kerja sebagai Unit Pengolah.
- (3) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan I bertanggung jawab dalam pengamanan dan penyusunan kebijakan hak akses Arsip di Pusat Arsip (*records center*).
- (4) Pejabat Fungsional Arsiparis di Unit Kearsipan II bertanggung jawab dalam pengamanan dan hak akses Arsip unit kerja.

Bagian Keempat Klasifikasi Akses Arsip

Paragraf 1 Pengguna Internal

Pasal 15

- (1) Pengguna internal Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. penentu kebijakan;
 - b. pelaksana kebijakan; dan
 - c. pengawas internal.
- (2) Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah atau perorangan.

Pasal 16

- (1) Penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah kewenangannya.
- (2) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip yang berada dibawah kewenangannya dengan tingkat Klasifikasi biasa.
- (3) Pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan Klasifikasi Terbatas dan Rahasia yang terdapat pada Kepala Perangkat Daerah, kecuali telah mendapat izin.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengguna Eksternal

Pasal 17

- (1) Pengguna eksternal Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. publik;

- b. pengawas eksternal; dan
 - c. aparat penegak hukum.
- (2) Pengguna eksternal berasal dari perorangan atau badan hukum di luar Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (3) Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip dengan kategori Biasa/Terbuka.
- (4) Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.

Pasal 19

Pengaturan akses arsip disusun dalam daftar arsip dinamis diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:

- a. Lampiran I kode angka 000 bidang tugas Umum;
- b. Lampiran II kode angka 100 bidang tugas Pemerintahan;
- c. Lampiran III kode angka 200 bidang tugas Politik;
- d. Lampiran IV kode angka 300 bidang tugas Keamanan dan Ketertiban;
- e. Lampiran V kode angka 400 bidang tugas Kesejahteraan;
- f. Lampiran VI kode angka 500 bidang tugas Perekonomian;
- g. Lampiran VII kode angka 600 bidang tugas Pekerjaan Umum dan Ketenagakerjaan;
- h. Lampiran VIII kode angka 700 bidang tugas Pengawasan;
- i. Lampiran IX kode angka 800 bidang tugas Kepegawaian;
- j. Lampiran X kode angka 900 bidang tugas Keuangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Setiap Unit Kearsipan melaksanakan Klasifikasi Arsip harus menyesuaikan dengan Klasifikasi Arsip sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 September 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 September 2019**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **29** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARAWANG

I. UMUM						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	000	UMUM				
	001	Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
		<ul style="list-style-type: none"> - Garuda - Bendera Kebangsaan - Daerah - Propinsi - Kota/Kabupaten 				
	002	Penghargaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
		<ul style="list-style-type: none"> - Bintang - Satya Lencana - Samkarya Nugraha - Monumen 				

	<ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan secara adat - Penghargaan lainnya 					
003	<ul style="list-style-type: none"> Hari Raya/ Besar - Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb - Keagamaan- Idul Fitri- Natal dll - Hari Ulang Tahun (HUT) 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
004	<ul style="list-style-type: none"> Ucapan - Ucapan Terima kasih - Ucapan Selamat - Ucapan Belasungkawa - Ucapan lainnya 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
005	Undangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
006	<ul style="list-style-type: none"> Tanda Jabatan - Pamong Praja - Tanda Pengenal - Pejabat lainnya 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .	
2	010	URUSAN DALAM				
	011	Gedung Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	012	<ul style="list-style-type: none"> Rumah Dinas - Tanah untuk rumah dinas 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

	- Perabotan				
	013 Mess/ Guest House	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	014 Rumah Susun/ Apartemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	015 Penerangan Listrik/ Jasa Listrik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	016 Telepon/Faximili/Internet	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	017 Keamanan / Ketertiban Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	018 Kebersihan Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	019 Protokol - Upacara Bendera - Tata tempat - Pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden - Audiensi - Alamat-alamat Kantor dan Pejabat - Sambutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
3	020 PERALATAN -Penawaran, Ekspose	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	021 Alat Tulis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	022 Mesin Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	023 Pejabat Kantor	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .

	024	Alat Angkutan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	025	Pakaian Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	026	Senjata	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	027	Pengadaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	028	Inventaris	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
4	030	KEKAYAAN DAERAH				
	031	Sumber Daya Alam	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis .
	032	Aset Daerah	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	040	PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI				
	041	Perpustakaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	042	Dokumentasi -Foto - Audio - Video	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	045	Kearsipan - Pola Klasifikasi - Penataan Berkas - Penyusutan Arsip - Pembinaan Kearsipan - Pemeliharaan/perawatan arsip	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	046	Sandi - Peralatan	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak keamanan Rahasia Negara	Bidang Teknis

		-Sistem -Sumber Daya Manusia -Pembinaan Persandian				
6	050	PERENCANAAN · REPELITA · Pelita Daerah · Bantuan Pembangunan Daerah · Bappeda · Perencanaan/ Proyek bidang peralatan · Bidang Perpustakaan · Bidang Kearsipan · Bidang Sandi · Organisasi/ Ketatalaksanaan · Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sub. Bag., Sub Bid, Sub Bag.
	051	Bidang Pemerintahan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	052	Bidang Politik	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	053	Bidang Keamanan Ketertiban	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	054	Bidang Kesejahteraan Rakyat	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	055	Bidang Perekonomian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	056	Bidang Pekerjaan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	057	Bidang Pengawasan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

				yang mengganggu kinerja		
	058	Bidang Kepegawaian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	059	Bidang Keuangan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
7	060	ORGANISASI/KETATALAKSANAAN				
	061	Organisasi pemerintah · Susunan dan tata kerja · Tata tertib Kantor, jam kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	062	Organisasi Badan Non Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	063	Organisasi Badan Internasional	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	064	Organisasi Semi Pemerintah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	065	Ketatalaksanaan/ tata naskah/Sistem	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	066	Stempel Dinas	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	067	Pelayanan Umum	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	068	Komputerisasi/Siskomendagri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	070	PENELITIAN				
	071	Riset	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	072	Survey	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	073	Kajian	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	074	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	075	Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	076	Non Departemen	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	077	Provinsi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	078	Kabupaten/Kota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	079	Kecamatan/Desa	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
9	080	KONFERENSI				
	081	Gubernur	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	082	Bupati/Walikota	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	083	Komponen eselon lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	084	Instansi Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	085	Internasional di dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	086	Internasional di luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
10	090	PERJALANAN DINAS				
	091	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	092	Perjalanan Menteri ke daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	094	Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	095	Perjalanan Tamu Asing ke Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

096	Perjalanan Presiden dan Wakil Presiden Keluar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
097	Perjalanan Menteri ke luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
098	Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
099	Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN
 AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

II. PEMERINTAHAN

NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	
1	130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA				
	131	Bupati/walikota meliputi				
		-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		-Meninggal,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	- Memori Kepala Daerah,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
131	Sambutan/Pengarahan/Amanat	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
132	Wakil Bupati/Walikota meliputi				
	-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	- Berita Acara Serah Terima Jabatan,	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
133	Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota meliputi				
	-Pencalonan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pengangkatan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-meninggal	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	Bidang Teknis

				kinerja	
	-Pelantikan,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	-Pemberhentian,	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Muspida	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum BAN (Badan Anggaran Nasional)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Forum Koordinasi lainnya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Kerjasama antar Kabupaten/Kota	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
135	Pembentukan/Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pembentukan Wilayah Pembantu Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Perubahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pemekaran Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Permasalahan Batas Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Pembentukan Ibukota/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberian Dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan.	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
136		Pembagian Wilayah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
137		Penyerahan Urusan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
138		Pemerintah Wilayah Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sambutan/Pengarahan/Amanat	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Perwakilan Kecamatan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
139		Laporan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Monitoring	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Evaluasi	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

2	140	PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN				
	141	Pamong Desa, meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan, Pemberhentian, dan sebagainya	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	142	Penghasilan Pamong Desa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	143	Kekayaan Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	144	Dewan Tingkat Desa/kelurahan, Dewan Marga, Rembug Desa/kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	145	Administrasi Desa/kelurahan	terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	146	Kewilayahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pembentukan Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemekaran Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/ Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Perubahan Nama Desa/Kelurahan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Kerjasama antar Desa/kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	147	Lembaga-lembaga Tingkat Desa, jangan klasifikasikan di sini, lihat 410 dengan perinciannya	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	148	Perangkat Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		Kepala Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Sekretaris Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Staf Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	149	Dewan Kelurahan	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Tetangga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Rukun Warga	Terbuka	Esselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	170	DPRD KABUPATEN				
	171	Keanggotaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pencalonan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pengangkatan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pemberhentian	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Recall	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Pelanggaran	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
172	Persidangan - Reses	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
173	Kesejahteraan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Keuangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penghargaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
174	Hak	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
175	Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	180	HUKUM			
	Konstitusi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Dasar hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Undang Undang Dasar	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Garis Besar Haluan Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Amnesti, Abolisi, dan Grasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
181	Perdata	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Tanah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Rumah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Utang/Piutang	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Gadai	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Hipotik	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Notariat	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
182	Pidana	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
183	Peradilan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Bantuan hukum	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
184	Hukum Internasional	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
185	Imigrasi	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Visa	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Pasport	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Exit	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	Reentry	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	Lintas Batas/Batas antar Negara	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
186	Rumah Tahanan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
187	Kejaksaan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
188	Peraturan Perundang-undangan	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Peraturan Daerah	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Peraturan Kabupaten/Kota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	Keputusan Bupati/Walikota	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
5	197	Kerjasama dengan Lembaga Asing	Terbatas	Esselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KARAWANG

III. POLITIK							
NO	KLASIFI KASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
1	200	POLITIK					
		-	Kebijakan Umum Orde Baru Reformasi	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	210		KEPARTAIAN Meliputi : pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pembubaran	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- - -	lambang Partai Kartu Tanda Anggota Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
		- -	Bantuan keuangan Parpol Rapat Koordinasi konsolidasi partai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

2	220		ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	221	- - - -	Berdasarkan Perjuangan Berkas tentang perjuangan perintis kemerdekaan Berkas tentang perjuangan angkatan 45 Berkas tentang perjuangan Veteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	222	- - -	Berdasarkan Kekaryaannya Kekaryaannya Pepabri Kekaryaannya Wredatama	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	223	-	Berdasarkan Kerohanian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	224	-	Lembaga Adat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3	230		ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL				
	231	-	Ikatan Dokter Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	232	-	Persatuan Guru Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	233	-	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

					unit kerja	
234	-	Persatuan Advokat Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
235	-	Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
236	-	Korps Pegawai Republik Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
237	-	Persatuan Wartawan Indonesia	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
238	-	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
239	-	Organisasi Profesi dan fungsional lainnya	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4	240	ORGANISASI PEMUDA				

	241	-	Organisasi Kepemudaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	242	-	Organisasi Mahasiswa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	243	-	Organisasi Pelajar	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	244	-	Organisasi Pemuda Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	250		ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN				
	251	-	Organisasi Buruh Nasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	252	-	Organisasi Buruh Internasional	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	253	-	Organisasi Tani	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas perangkat daerah unit kerja	
254	-	Organisasi Nelayan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
255	-	Organisasi Angkutan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6		ORGANISASI WANITA				
261	-	Dharma Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
262	-	Persatuan Wanita Indonesia	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
263	-	Pemberdayaan Perempuan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
264	-	Kongres Wanita	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	265	-	Organisasi Wanita Keagamaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	270		PEMILIHAN UMUM				
	271	-	Pencalonan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	272	-	Nomor urut Partai/ Tanda Gambar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	273	-	Kampanye / Dana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	274	-	Petugas Pemilu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	275	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	276	-	S a r a n a Sarana T P S Sarana kendaraan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah	Bidang Teknis

285	-	Pemilih / Daftar Pemilih	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
286	- - - - -	S a r a n a Sarana T P S Sarana kendaraan Surat suara Kotak suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
287	-	Pemungutan suara / Penghitungan suara	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
288	-	Pengambilan sumpah/janji anggota MPR,DPR,DPD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
9	290	KOMISI PEMILIHAN UMUM/ BAWASLU					
	291	-	Panwaslu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis


 BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

IV. KEAMANAN DAN KETERTIBAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
1	300	KEAMANAN/KETERTIBAN					
	301	-	Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	302	-	Penertiban PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	303	-	P S K	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	304	-	Gepeng	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	305	-	P P N S	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
2	310		PERTAHANAN				
	311	-	Darat	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang, Seksi, SuBag
	312	-	Laut	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	313	-	Udara	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	314	-	Perbatasan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis

3	320		KEMILITERAN				
	321	-	Latihan Militer	terbatas	Eselon III	Mengalibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	322	-	Wajib Militer	terbuka	Eselon III	Mengalibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	323	-	Operasi Militer	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	324	-	Kekayaan ABRI/ TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	325	-	Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
4	330		KEAMANAN				
	331	-	Kepolisian	Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis

332	-	Huru hara/ demonstrasi	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
333	-	Senjata api/ senjata tajam	terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
334	-	Bahan Peledak	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
335	-	Perjudian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
336	-	Surat surat Kaleng	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
337	-	Pengaduan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	338	-	Himbauan / larangan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	340	PERTAHANAN SIPIL					
	341	-	Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
6	350	KEJAHATAN					
	351	-	Makar / Pemberontakan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	352	-	Pembunuhan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	353	-	Penganiayaan, pencurian dan perampasan	Rahasia	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	354	-	Subversi/Penyelundupan/Narkotika	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis

	355	-	Pemalsuan	Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya Keamanan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Bidang Teknis
	356	-	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	357	-	Perkosaan/Perbuatan Cabul	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	358	-	Kenakalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	359	-	Kajahatan Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
7	360	BENCANA					
	361	-	Gunung berapi / gempa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	362	- Banjir / tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	363	- Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	364	- Kebakaran - Pembinaan, - Penanggulangan, - Pencegahan - Pemadaman - Pengujian instalasi - Antisipasi - Proteksi, APAR - Kebutuhan sarpras	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	365	- Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	366	- Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
8	370	- KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	371	- D a r a t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

372	-	U d a r a	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
373	-	L a u t	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
374	-	Sungai / danau	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis


BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
 ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARAWANG

V. KESEJAHTERAAN RAKYAT						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	400	KESEJAHTERAAN RAKYAT				
	401	Keluarga Miskin	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/Unit kerja	Bidang Teknis
	402	Bantuan langsung Tunai (BLT)	Biasa / Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	403	Raskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	404	Askeskin	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	405	Jamkessos/Jamkesda	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

2	410	PEMBANGUNAN DESA/KELUARAHAAN				
	411	PEMBINAAN USAHA GOTONG ROYONG				
	a.	Swadaya Gotong Royong	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Penataan gotong royong 2) Gotong royong dinamis 3) Gotong royong statis 4) Pungutan				
	b.	Lembaga Sosial Desa (LSD)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pembinaan, 2) Klasifikasi, 3) Proyek, 4) Musyawarah desa				
	c.	Latihan Kerja Masyarakat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kader masyarakat, 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN), 3) Pusat latihan, 4) Kursus-kursus, 5) Kurikulum/syllabus, 6) Keterampilan, 7) Pramuka				
	d.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	e.	Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	f.	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Program, 2) Pembinaan organisasi, 3) Kegiatan				
	g.	Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Publikasi, 2) Peragaan, 3) Sosio drama, 4) Siaran pedesaan, 5) Penyuluhan lapangan				
	h.	Kelembagaan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kelompok tani, 2) Rukun tani 3) Subak 4) Dharma Tirta				
412	PEREKONOMIAN DESA					
	a.	Produksi Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pengolahan 2) Pemasaran				
	b.	Keuangan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perkreditan desa, 2) Inventarisasi data, 3)Perkembangan/pelaksanaan, 4) Bantuan/stimulans 5)Petunjuk/pembinaan pelaksanaan				
c.	Koperasi Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
	1) Badan Usaha Unit Desa (BUUD)					

	2) Koperasi Unit Desa (KUD)			OPD/unit kerja	
d.	Penataan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Jumlah desa yang diberi bantuan, 2) Pengarahan 3) Pusat 4) Daerah				
e.	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pusat 2) Daerah				
f.	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Bantuan langsung, 2) Bantuan keserasian, 3) Bantuan juara lomba desa				
g.	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)				
413	PRASARANA DESA				
	a. Prasarana Desa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pembinaan 2) Bimbingan teknis			

	b.	Pemukiman Kembali Penduduk 1) Lokasi, 2) Diskusi 3) Pelaksanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	c.	Masyarakat Pradesa 1) Pembinaan 2) Penyuluhan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa 1) Rumah sehat, 2) Proyek perintis, 3) Pelaksanaan, P 4) Pengembangan 5) Perbaikan kampung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
414	PENGEMBANGAN DESA					
	a.	Tingkat Perkembangan Desa 1) Jumlah desa, 2) Pemekaran desa, 3) Pembentukan desa baru, 4) Evaluasi, 5) Bagan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP) 1) Penyuluhan program, 2) Lokasi UDKP, 3) Pelaksanaan, 4) Bimbingan/pembinaan, 5) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	c.	Tata Desa 1) Inventarisasi, 2) Penyusunan pola tata desa, 3) Aplikasi tata desa, 4) Pemetaan, 5) Pedoman pelaksanaan, 6) Evaluasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Perlombaan Desa 1) Pedoman, 2) Penilaian, 3) Kejuaraan, 4) Piagam	Biasa/ Terbuka			
415	KOORDINASI					
	a.	Sektor Khusus Berkas tentang koordinasi sector khusus di Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH) Berkas tentang rapat koordinasi ahorizontal dengan lembaga di lingkungan internal dan eksternal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Biasa/ Terbuka			
	c.	Tim Koordinasi Pusat (TKP) Berkas tentang tim koordinasi pusat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Kerjasama	Biasa/ Terbuka			

		d.	1) Luar negeri (UNICEF), 2) Perguruan tinggi, 3) Departemen/lembaga non departemen			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
3	420	PENDIDIKAN					
	421	SEKOLAH					
		a.	Pra Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		b.	Sekolah Dasar/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		c.	Sekolah Menengah/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		d.	Sekolah Tinggi/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		e.	Sekolah Kejuruan/Sederajat	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		f.	Kegiatan Sekolah, Dies Natalis, Lustrum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		g.	Kegiatan Pelajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
			1) Reuni, darmawisata, 2) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), 3) Pelajar teladan, dan 4) Resimen Mahasiswa (MENWA)				
		h.	Sekolah Pendidikan Luar Biasa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

				OPD/unit kerja		
	i.	Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
422	ADMINISTRASI SEKOLAH					
	a.	Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Tahun Pelajaran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	c.	Hari Libur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Uang Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	e.	Bea Siswa	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	f.	Biaya Operasional Sekolah (BOS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
423	METODE BELAJAR					
	a.	Kuliah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Ceramah, simposium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	c.	Diskusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tour	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	e.	Kurikulum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	f.	Karya Tulis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	g.	Ujian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
424	TENAGA PENGAJAR Berkas tentang tenaga pengajar yang meliputi guru, dosen, dekan, rector dan guru teladan		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
425	SARANA PENDIDIKAN					
	a.	Gedung	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedung sekolah, 2) Kampus 3) Pusat kegiatan mahasiswa				
	b.	Buku	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang buku pelajaran dan diktat kuliah				
	c.	Perlengkapan Sekolah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang perlengkapan				

		sekolah			OPD/unit kerja	
426	KEOLAHRAGAAN					
	a.	Cabang Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Gedung olah raga, 2) Stadion, 3) Lapangan, 4) Kolam renang				
	c.	Pesta Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	KONI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
427	KEPEMUDAAN Berkas tentang kepemudaan yang meliputi organisasi pemuda, kegiatan remaja dan gelanggang remaja		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
428	KEPRAMUKAAN		Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
429		PENDIDIKAN KEDINASAN DEPDAGRI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
4	430	KEBUDAYAAN				
	431	KESENIAN				

	a.	Cabang Kesenian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang gedung kesenian				
432		KEPURBAKALAN				
	a.	Museum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Peninggalan Kuno	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Candi, termasuk pemugaran 2) Benda peninggalan kuno				
433		SEJARAH	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
434		BAHASA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
435		USAHA PERTUNJUKAN, HIBURAN, KESENANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang usaha pertunjukan, hiburan, dan kesenangan				
436		KEPERCAYAAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
5	440	KESEHATAN				

441		PEMBINAAN KESEHATAN				
	a.	Gizi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Mata				
	c.	Jiwa				
	d.	Kanker				
	e.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)				
	d.	Perawatan				
	e.	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)				
h.	Pekan Imunisasi Nasional					
442		OBAT-OBATAN				
	a.	Pengadaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
b.	Penyimpanan					
443		PENYAKIT MENULAR				
443	a.	Pencegahan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	b.	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kusta 2) Kelamin 3) Frambosia 4) TBC/AIDS/HIV				
	c.	Epidemiologi dan Karantina (Epidka)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
1) Kholera 2) Imunisasi						

		3) Surveilense 4) Rabies/anjing gila, Antraks				
	d.	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber Binatang (P2B)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Malaria 2) Dengue Faemorrhagic Fever (Demam Berdarah HDF) 3) Filaria 4) Serangga				
	e.	Hygiene Sanitasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Tempat-tempat Pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM) 2) Sarana air minum dan jamban keluarga (Samijaga) 3) Pestisida				
444		GIZI				
444	a. b. c. d. e.	Kekurangan Makanan, Bahaya Kelaparan, Busung Lapar Keracunan Makanan Menu Makanan Rakyat Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
445		RUMAH SAKIT, BALAI KESEHATAN, PUSKESMAS,	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		PUSKESMAS KELILING, POLIKLINIK, POSYANDU			OPD/unit kerja	
446		TENAGA MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
447		ALAT MEDIS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
448		PENGOBATAN TRADISIONAL				
448	a. b. c. d.	Pijat Tusuk jarum Jamu tradisional/herbal Dukun/paranormal	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
6	450	AGAMA				
	451	ISLAM				
	a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Sholat 2) Zakat, Fitrah 3) Puasa 4) MTQ				
	b.	Rumah Ibadah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	c.	Tokoh Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	d.	Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Tinggi 2) Menengah 3) Dasar 4) Pondok Pesantren				

	5) Gedung Sekolah 6) Tenaga Pengajar 7) Buku 8) Dakwah 9) Organisasi/Lembaga Pendidikan 10) TPA/TQA/TPQ				
e.	Harta Agama	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
f.	Peradilan	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
g.	Organisasi Keagamaan Bukan Politik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang Majelis Ulama Indonesia				
h	Mazhab	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
452	KRISTEN PROTESTAN				
a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
b.	Rumah ibadah				
c.	Tokoh agama, rohaniawan,				
d.	pendeta, domine				
e.	Mazhab Organisasi gerejani				
453	KATHOLIK				
a.	Peribadatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak	Bidang Teknis

	b. c. d. e.	Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan, pastor Mazhab Organisasi gerejani			yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	
454		HINDU				
454	a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
455		BUDHA				
455	a. b. c. d. e.	Peribadatan Rumah ibadah Tokoh agama, rohaniawan Mazhab Organisasi keagamaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
456		URUSAN HAJI				
456	a. b. c.	ONH Umroh Manasik	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
7	460	SOSIAL				
	461	REHABILITASI PENDERITA CACAT				
	a. b. c. d.	Cacat Mata Cacat tubuh Cacat mental Bisu tuli	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

462		TUNA SOSIAL				
	a. b. c. d.	Gelandangan Pengemis Tuna susila Anak nakal/anak jalanan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
463		KESEJAHTERAAN ANAK/KELUARGA				
	a. b. c. d.	Anak Putus Sekolah Ibu teladan Keluarga sakinah Anak asuh	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
464		PEMBINAAN PAHLAWAN				
	a. b. c.	Pahlawan Perintis kemerdekaan Cacat veteran	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
465		KESEJAHTERAAN SOSIAL				
	a. b.	Lanjut Usia Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
466		SUMBANGAN SOSIAL				
	a. b. c. d.	Korban Bencana Pencarian Dana untuk Sumbangan Panti Asuhan Panti Jompo	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
467		BIMBINGAN SOSIAL	Biasa/ Terbuka			
		Berkas tentang bimbingan, pendidikan, kesehatan, dan		Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		pemukiman untuk masyarakat suku terasing				
468		PMI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
469		MAKAM				
	a. b. c. d.	Umum Pahlawan Khusus keluarga raja Krematorium	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
8	470	KEPENDUDUKAN				
	471	PENDAFTARAN PENDUDUK				
	a.	Identitas Penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Biodata 2) Nomor Induk Kependudukan 3)Kartu Tanda Penduduk 4) Kartu Keluarga 5)Advokasi Identitas Penduduk				
	b.	Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1)Perpindahan penduduk WNI 2) ssPerpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia 3)Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara				

	4) Daerah terbelakang 5) Bedol desa				
c.	Perpindahan Penduduk Antar Negara	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penduduk Indonesia ke luar negeri 2) Orang asing tinggal sementara 3) Orang asing tinggal tetap 4) Perpindahan penduduk antar Negara di wilayah perbatasan antar Negara (pelintas batas tradisional)				
d.	Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Akibat bencana alam 2) Akibat kerusuhan sosial 3) Pendaftaran penduduk daerah terbelakang 4) Pendaftaran penduduk rentan				
472	PENCATATAN SIPIL				
a.	Kelahiran, Kematian, dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Kelahiran 2) Kematian 3) Advokasi kelahiran dan kematian 4) Perkawinan, perceraian dan				

	advokasi				
b.	Perkawinan Agama Islam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1)Perceraian agama non Islam 2) Perceraian agama Islam 3)Perceraian agama non Islam 4) Advokasi perkawinan dan perceraian				
c.	Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pengangkatan anak 2) Pengakuan anak 3)Pengesahan anak 4) Perubahan akta 5)Pembatalan akta 6) Advokasi pengurusan pengangkatan, pengakuan dna pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta				
d.	Pencatatan Kewarganegaraan	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Akibat perkawinan 2) Akibat kelahiran 3)Non perkawinan 4) Non kelahiran 5)Perubahan WNI ke WNA 6) Perubahan WNA ke WNI				

473		INFORMASI KEPENDUDUKAN				
	a.	Teknologi Informasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Perangkat keras 2) Perangkat lunak 3) Jaringan komunikasi data				
	b.	Kelembagaan dan Sumber Daya Informasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Daerah maju 2) Daerah berkembang 3) Daerah terbelakang				
	c.	Pengolahan Data Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Pendaftaran penduduk 2) Kejadian vital penduduk 3) Penduduk non registrasi				
	d.	Pelayanan Informasi Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Media elektronik 2) Media cetak 3) Outlet					
474		PERKEMBANGAN PENDUDUK				
	a.	Pengarahan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Struktur jumlah 2) Komposisi 3) Fertilitas 4) Kesehatan reproduksi 5) Morbiditas penduduk					

	6) Mortalitas penduduk				
b.	Pengembangan Kuantitas Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Anak dan remaja 2) Penduduk usia produktif 3) Penduduk lanjut usia 4) Gender				
c.	Penataan Persebaran Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Migrasi antar wilayah 2) Migrasi internasional 3) Urbanisasi 4) Sementara 5) Migrasi non permanen				
d.	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pengembangan sistem perlindungan penduduk 2) Pelayanan kelembagaan ekonomi 3) Pelayanan kelambagaan sosial budaya 4) Partisipasi masyarakat				
e.	Pengembangan Wawasan Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Pendidikan jalur sekolah 2) Pendidikan jalur luar sekolah 3) Pendidikan jalur				

	masyarakat 4) Pembangunan berwawasan kependudukan				
475	PROYEKSI DAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN				
a.	Indikator Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Perumusan penetapan dan pengembangan indikator kependudukan 2) Pemanfaatan indikator kependudukan 3) Sosialisasi indikator kependudukan				
b.	Proyeksi Penduduk	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penyusunan dan pengembangan proyeksi kependudukan 2) Pemanfaatan proyeksi kependudukan				
c.	Analisis Dampak Kependudukan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Penyusunan dan pengembangan analisis dampak kependudukan 2) Pemanfaatan analisis dampak kependudukan				
d.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Non Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Lembaga internasional,				

	2) Lembaga masyarakat dan nirlaba, 3) Lembaga usaha swasta				
e.	Penyerasian Kebijakan Lembaga Pemerintah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	1) Lembaga pemerintah 2) Pemerintah provinsi dan kota 3) Pemerintah kabupaten				
f.	Analisis	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang analisis proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan				
476	MONITORING	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
477	EVALUASI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
478	DOKUMENTASI KEPENDUDUKAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
479	KELUARGA BERENCANA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
9	480	MEDIA MASSA			
	481	PENERBITAN	Biasa/ Terbuka		
		1) Surat kabar 2) Majalah 3) Buku	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

		4) Penerjemahan 5) Buletin 6) Jurnal 7) Kliping				
482		RADIO	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) RRI 2) Non RRI 3)Radio luar negeri 4) Radio internet				
483		TELEVISI	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) TVRI 2) Swasta lokal, nasional, 3)Luar negeri 4) Televisi internet				
484		FILM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
485		PERS	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		1) Kewartawanan, 2) Wawancara 3)Informasi nasional				
486		GRAFIKA	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang grafika/cetak buku				
487		PENERANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
		Berkas tentang pameran non komersil				

488	OPERATION ROOM	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang operation room terkait media massa				
489	HUBUNGAN MASYARAKAT	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	Berkas tentang hubungan masyarakat terkait media massa				



 BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

VI. PEREKONOMIAN							
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP		KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3		4	5	6	7
1	500	-	PEREKONOMIAN • Dewan Stabilisasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	501	-	PENGADAAN PANGAN	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	502	-	PENGADAAN SANDANG	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	503	-	Perizinan pada umumnya untuk perizinan suatu bidang, klasifikasi pada maslahnya (IMB, SIUP, TDP, HO, TDG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
2	510	-	PERDAGANGAN / TATANIAGA				
			-Promosi Perdagangan - Pekan Raya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Iklan - Pameran/Ekspo komersil - Pelelangan - Tera/Timbang - Ulang/Kalibrasi 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III		
511	-	Pemasaran - Sembilan Bahan Pokok - Pasar Tradisional - Pasar Modern - Pertokoan, Kaki Lima, Kios	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
512	-	EKSPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
513	-	IMPOR	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
514	-	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
515	-	PERDAGANGAN LUAR NEGERI	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
516	-	PERGUDANGAN; TERMASUK TANGKI PENYIMPANAN MINYAK GORING	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
517	-	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
518	-	KOPERASI (UNTUK BUUD, KUD, KUR)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
3	520	PERTANIAN				

521	-	<p>Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program <ul style="list-style-type: none"> - Bimas/Inmas termasuk kredi - Penyuluhan - Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Padi/Panen - Palawija - Jagung - Ketela Pohon/Ubi-ubian - Hortikultura - Sayuran/Buah-buahan - Tanaman Hias - Pembudidayaan Rumput Laut - Saran Usaha Pertanian <ul style="list-style-type: none"> - Peralatan - Pembibitan - Pupuk - Perlindungan Tanaman <ul style="list-style-type: none"> - Penyakit, Penyakit Daun, Penyakit Batang - Hama-hama serangga, wereng, Walang sangit, tungro, hama tikus dan sejenisnya - Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan, geropyokan, sprayer, pemberantasan melalui udara - Pestisida - Tanah Pertanian Pangan <ul style="list-style-type: none"> - Persawahan - Perladangan - Kebun - Rumpon Ikan Laut - KTA/Lahan Kritis 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/ Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III</p> <p>Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>	<p>Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja</p>	<p>Bidang Teknis</p>
-----	---	--	---	---	--	----------------------

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengusaha Petani - Bina Usaha <ul style="list-style-type: none"> - Pasa Panen - Pemasaran Hasil - Kelompok tani - Rukun tani 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III		
522	-	<p>Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program <ul style="list-style-type: none"> - Hak Pengusahaan Hutan - Tata Guna Hutan - Perpetaan Hutan - Tumpangsari - Produksi <ul style="list-style-type: none"> - Kayu - Non Kayu - Sarana Usaha Kehutanan - Penghijauan, Reboisasi - Kelestarian <ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan - Penyakit/Hama - Jenis-jenis hutan <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung 	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu - Non Kayu - Sarana Usaha Kehutanan - Penghijauan, Reboisasi - Kelestarian <ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan - Penyakit/Hama - Jenis-jenis hutan <ul style="list-style-type: none"> - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
		<ul style="list-style-type: none"> - Cagar Alam, Margasatwa, Suaka Margasatwa - Berburu, meliputi larangan dan izin berburu - Kebun Binatang - Konservasi Lahan 	Biasa/Terbuka	Eselon III		
		<ul style="list-style-type: none"> - Hutan Hidup - Hutan Wisata - Hutan Produksi - Hutan Lindung 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III		

523	-	Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Program - Penyuluhan - Teknologi - Produksi - Pelelangan - Usaha Perikanan - Pembibitan - Daerah Penangkapan - Pertambakan, meliputi : tambak ikan deras, tambak udang dan lain-lain - Sarana - Peralatan - Kapal - Pelabuhan 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
524	-	Peternakan <ul style="list-style-type: none"> - Produksi - Susu ternak rakyat - Telur - Daging - Kulit - Sarana Usaha Ternak - Pembibitan - Kandang ternak - Kesehatan Hewan - Penyakit Hewan - Pos Kesehatan Hewan - Tesi Pullorum - Karantina - Pemberantasan Penyakit Hewan termasuk upaya pencegahannya 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

		<ul style="list-style-type: none"> - Perunggasan - Pengembangan Ternak - Inseminasi Buatan - Pembibitan/Bibit Unggul - Penyebaran Ternak - Makanan Ternak - Tempat Pemotongan Hewan - Data Peternakan 	<p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>		
	525	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan <ul style="list-style-type: none"> - Program - Produksi - Karet - The - Tembakau - Tebu - Cengkeh - Kopra - Kopi - Cokelat - Aneka Tanaman 	<p>Biasa/Terbuka</p> <p>Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka</p>	<p>Eselon III</p> <p>Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III</p>	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
4	530	<ul style="list-style-type: none"> - Perindustrian <ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Gangguan 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	531	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Logam 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	532	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Mesin/Elektronik 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	533	<ul style="list-style-type: none"> - Industri Kimia/Farmasi 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	534	-	Industri Tekstil	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	535	-	Industri Makanan/Minuman	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	536	-	Aneka Industri/Perusahaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	537	-	Aneka Kerajinan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	538	-	Usaha Negara/BUMN - Perusahaan Jawatan - Perusahaan Umum - Persero/PT, CV, UD, Firma	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	539	-	Perusahaan Daerah/BUMD	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
5	540	-	Pertambangan/Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN				
	541	-	BBM	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	542	-	Gas Bumi - Eksploitasi/Pengeboran - Kontrak Kerja - Pengolahan Tangki, Pompa Tanker	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	543	-	Logam Mulia - Emas - Intan/Batu Mulia - Perak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	544	-	Logam - Timah - Aluminium, Boxit - Besi, termasuk besi tua - Tembaga	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	545	-	Aneka Tambang - Batu Bara	terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	546	-	Geologi - Vulkanologi - Pengawasan Gunung Berapi - Sumur Artesis, air Bawah Tanah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	547	-	Hidrologi	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	548	-	Kesamuderaan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
			PERHUBUNGAN				
6	550	-	Perhubungan	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	551	-	Perhubungan Darat - Lalulintas Jalan Raya, Sungai, Danau - Keamanan Lalulintas, rambu-rambu - Angkutan Jalan Raya - Perizinan - Alat angkutan - Terminal - Perkeretaapian	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

554	-	Pos	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
555	-	Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none"> - Telepon, HT - Telegram - Telex/SSB, Faximile - Satelit, Internet - Stasiun Bumi, Parabola - Menara Telekomunikasi . 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
556	-	Pariwisata dan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - Obyek Kepariwisataaan - Perhotelan - Travel Service - Tempat Rekreasi - Tempat sejarah/monumen 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
557	-	Meteorologi <ul style="list-style-type: none"> - Ramalan Cuaca - Curah Hujan - Kemarau Panjang 	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis	
		TENAGA KERA					
7	560	-	Tenaga Kerja <ul style="list-style-type: none"> - Pengangguran 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	561	-	Upah	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	562	-	Penempatan Tenaga Kerja, TKI <ul style="list-style-type: none"> - Outsourching 	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis

	563	-	Latihan Kerja, Magang	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	564	-	Tenaga Sukarela - Butsi - Padat Karya	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	565	-	Perselisihan Perburuhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	566	-	Keselamatan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja	Bidang Teknis
	567	-	Pemutusan Hubungan Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	568	-	Kesejahteraan Buruh (Kesehatan, Perumahan, dll.)	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	569	-	Tenaga Orang Asing	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
			PERBANKAN / MONETER				
8	570	-	Permodalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	571	-	Modal Domestik	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan	Bidang Teknis

					tugas lembaga daerah		
572	-	Modal Asing	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
573	-	Modal Patungan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
574	-	Pasar Uang dan Modal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
575	-	Saham	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis	
9	580	-	Perbankan/Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	581	-	Kredit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	582	-	Investasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	583	-	Deposito	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	584	-	Bank Pembangunan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	585	-	Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	586	-	Alat Pembayaran, Cek, Giro, Wesel, Transfer	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	587	-	Fiskal	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	588	-	Hutang Negara, Obligasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	589	-	Moneter	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
10	590	-	Agraria	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
	591	-	Tata Guna Tanah - Pemetaan dan Pengukuran - Perpetaan - Penyediaan Data - Fatwa Tata Guna Tanah - Tanah Kritis	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis

	- Perorangan	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Pakai	Terbatas	Eselon III		
	- Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI)	Terbatas	Eselon III		
	- Perseorangan, Warga Negara Asing (WNA)	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum Indonesia	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat Kantor Dagang Asing	Terbatas	Eselon III		
	- Tanah Gedung-gedung Negeri	Terbatas	Eselon III		
	- Guna Usaha	Terbatas	Eselon III		
	- Perkebunan Besar	Terbatas	Eselon III		
	- Perkebunan Rakyat	Terbatas	Eselon III		
	- Peternakan	Terbatas	Eselon III		
	- Perikanan	Terbatas	Eselon III		
	- Kehutanan	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Guna Bangunan	Terbatas	Eselon III		
	- Perorangan	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum	Terbatas	Eselon III		
	- P3MB (Panitia Penguasaan Milik Belanda)	Terbatas	Eselon III		
	- Badan Hukum Asing Belanda-PRK No.5165	Terbatas	Eselon III		
	- Pemulihan Hak (PerPres 4/1960)	Terbatas	Eselon III		
	- Hak Pengelolaan	Terbatas	Eselon III		
	- PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate	Terbatas	Eselon III		
	- Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan	Terbatas	Eselon III		
	- Sengketa Tanah				
	- Peradilan Perkara Tanah (lihat klasifikasi 183)				
	- Pencabutan dan Pembebasan Tanah				
	- Pencabutan Hak				
	- Pembebasan Tanah				
	- Ganti Rugi Tanah				

594	-	Pendaftaran Tanah - Pengukuran/Pemetaan - Fotogrametri - Teristis - Triangulasi - Peralatan - Dana Pengukuran (PerMen Agraria No.61/1965) - Sertifikat - Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) - Ajudikasi	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
595	-	Lahan Transmigrasi - Tata Guna Tanah - Landreform - Pengurusan Hak-hak Tanah - Pendaftaran Tanah	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis
596	-	- Tanah kosong	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga daerah	Bidang Teknis


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

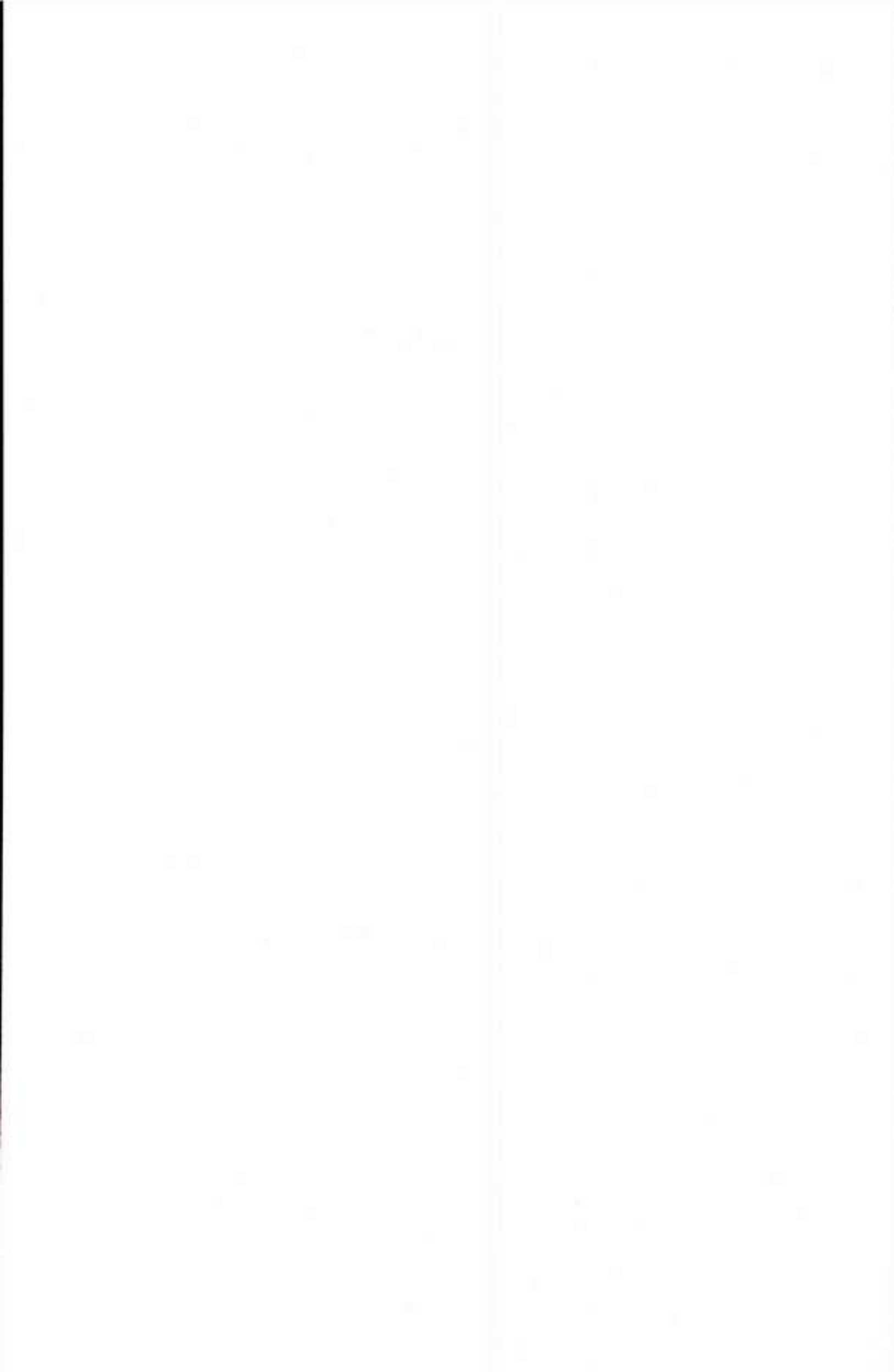
VII. PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

NO	KLASIFIKASI	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH	
1	2	3	4	5	6	
1	600	Tata Bangunan Konstruksi, dan Industri Konstruksi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang teknis
	602	Kontraktor Pemborong <ul style="list-style-type: none"> - Tender / lelang - Penunjukan langsung - Prakuifikasi <ul style="list-style-type: none"> • Daftar Rekanan Mampu (DRM) • Tanda Daftar Rekanan (TDR) 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	603	Arsitektur	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
	604	Bahan Bangunan <ul style="list-style-type: none"> - Tanah dan batu - Aspal, Aspal buatan, Aspal alam - Besi dan logam lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Besi beton 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Besi profil • Paku • Alumunium, profil <ul style="list-style-type: none"> - Bahan-bahan perlindungan dan pengawet - Semen - Kayu seperti balok, papan, dolken - Bahan penutup atap - Alat-alat penggantung dan pengunci - Bahan-bahan bangunan lainnya 				
605	<p>Instalasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi bangunan - Instalasi listrik - Instalasi air sanitasi - Instalasi pengatur udara - Instalasi akustik - Instalasi cahaya / penerangan 	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja OPD/unit kerja	Bidang Teknis
606	<p>Konstruksi Pencegahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran - Konstruksi pencegahan terhadap gempa - Konstruksi pencegahan terhadap angin udara - Konstruksi pencegahan terhadap kekaduhan - Konstruksi pencegahan terhadap gas/explosive - Konstruksi pencegahan terhadap serangga - Konstruksi pencegahan terhadap radiasi atom 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
2	<p>610</p> <p>Irigasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan waduk <ul style="list-style-type: none"> * Bendungan * Tanggul * Pelimpahan banjir * Menara pengambilan - Bangunan pengambilan <ul style="list-style-type: none"> • Bendungan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Bendungan dengan pintu bilas • Bendungan dengan pompa • Pengambilan bebas • Pengambilan bebas dengan pompa • Sumur dengan pompa • Kantong lumpur • Silt ekstraktor • Escape Channel - Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan • Box Tersier • Got miring • Talang • Syphon • Gorong-gorong • Pelimpah samping - Bangunan Pembuang <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan • Gorong-gorong pembuang • Talang pembuang • Syphon pembuang - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Jalan • Jembatan • Tangga cuci • Kubangan kerbau • Waduk lapangan • Bangunan penunjang • Jaringan telepon - Stasiun agro | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

611	<p>Folder:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggul keliling <ul style="list-style-type: none"> • Tanggul • Bangunan penutup sungai • Jembatan - Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Stasiun pompa pemasukan • Bangunan bagi • Gorong-gorong • Syphon - Bangunan pembuang <ul style="list-style-type: none"> • Stasiun pompa pembuang • Saluran • Pintu air pembuangan • Gorong-gorong pembuangan • Syphon pembuangan - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan - Rumah petugas eksploitasi 	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
612	<p>Pasang Surut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pembawa <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan pintu pemasukan - Bangunan pembuang <ul style="list-style-type: none"> • Saluran • Bangunan pintu pembuang - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Kolam pasang • Saluran • Bangunan • Jalan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis



	- Jembatan				
613	Pengendalian Sungai - Bangunan pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Tanggul banjir • Pintu pengatur banjir • Klep pengatur banjir • Tembok pengaman talud • Krib • Kantung lumpur • Chek-dam • Syphon - Saluran pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Saluran banjir • Saluran drainage • Corepure - Bangunan lainnya <ul style="list-style-type: none"> • Warning system - Stasiun	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
614	Pengamanan Pantai - Tanggul - Krib - Bangunan lainnya	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
615	Air Tanah - Stasiun pompa - Bangunan pembawa - Bangunan pembuang - Bangunan lainnya	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
3	620 Jalan Kota - Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tanah • Stabilitas - Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> • Lapis pondasi bawah • Lapis pondasi • Lapis permukaan - Drainage <ul style="list-style-type: none"> • Parit tanah • Gorong-gorong - Buku Trotuir <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Perkerasan • Pasangan - Median <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan - Daerah samping <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Pagar 			dan tugas	
--	---	--	--	-----------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pelengkap dan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu/ tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu pengatur lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW (Sempadan) • Rel pengamananan • Pagar • Turap, penahan - Bronjong 				
621	<p>Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gedung proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Badan jalan <ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan tanah • Stabilisasi - Perkerasan <ul style="list-style-type: none"> • Lapis pondasi • Lapis pondasi bawah • Lapis permukaan - Drainage <ul style="list-style-type: none"> • Parit 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Gorong-gorong • Sub drainage <ul style="list-style-type: none"> - Trotoar <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Perkerasan - Median <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Perkerasan • Pasangan - Daerah samping <ul style="list-style-type: none"> • Tanaman • Pagar - Bangunan perlengkapan dan pengamanan <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rel-rel pengamanan • Pagar • Turap pengamanan - Bronjong 					
	623	Jalan Layang	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
4	630	Jembatan pada Jalan Kota <ul style="list-style-type: none"> - Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman 	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

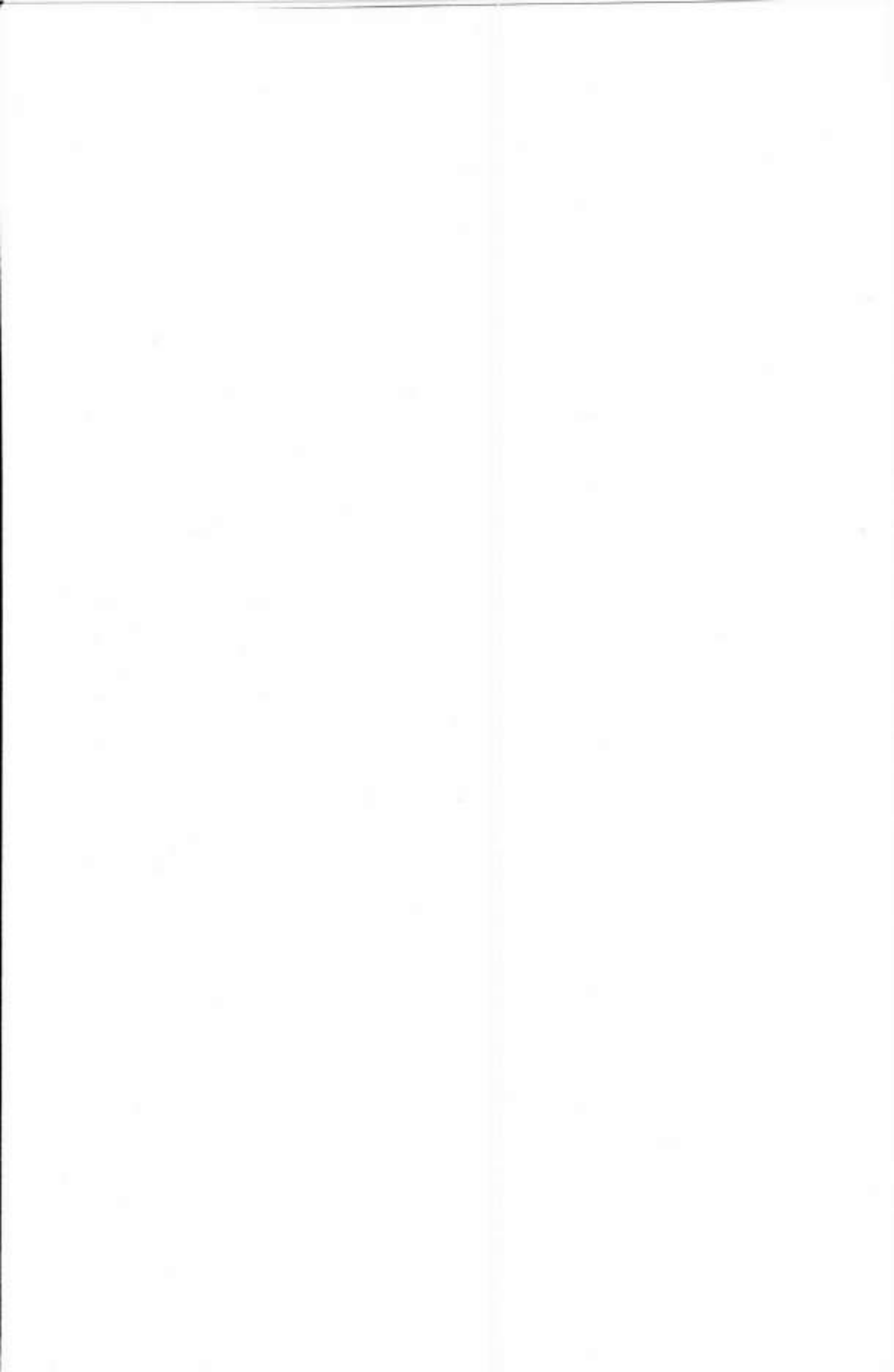
- | | | | | |
|---|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan - Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Pekerjaan tanah <ul style="list-style-type: none"> • Galian tanah • Timbunan tanah - Pondasi <ul style="list-style-type: none"> • Pondasi kepala jalan • Pondasi pilar • Angker - Bangunan bawah <ul style="list-style-type: none"> • Kepala jembatan • Pilar • Pilon • Landasan - Bangunan <ul style="list-style-type: none"> • Gelagar • Lantai • Perkerasan • Jalan orang/Trotoar • Sandaran • Talang air - Bangunan/pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Turap/penahan • Bronjong • Strek dam | | | | |
|---|--|--|--|--|

	<ul style="list-style-type: none"> • Kist dam • Corepure • Krib <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rei-rei pengaman • Pagar - Oprit <ul style="list-style-type: none"> • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku - Median 				
632	<p>Jembatan pada Jalan Luar Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah penguasaan <ul style="list-style-type: none"> • Tanah • Tanaman • Bangunan - Bangunan sementara <ul style="list-style-type: none"> • Jalan sementara • Jembatan sementara • Kantor proyek • Gudang proyek • Barak kerja • Laboratorium lapangan • Rumah - Pekerjaan tanah <ul style="list-style-type: none"> • Galian tanah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • Timbunan tanah - Pondasi <ul style="list-style-type: none"> • Pondasi kepala jalan • Pondasi pilar • Angker - Bangunan bawah <ul style="list-style-type: none"> • Kepala jembatan • Pilar • Piloon • Landasan - Bangunan atas <ul style="list-style-type: none"> • Gelagar • Lantai • Perkerasan • Jalan orang/Trotoar • Sandaran • Talang air - Bangunan pengaman <ul style="list-style-type: none"> • Turap/penahan • Bronjong • Strek dam • Kist dam • Corepure • Krib - Bangunan pelengkap <ul style="list-style-type: none"> • Rambu-rambu / Tanda lalu lintas • Lampu penerangan • Lampu lalu lintas • Patok-patok KM • Patok-patok ROW • Rel-rel pengaman • Pagar 				
--	--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Oprit <ul style="list-style-type: none"> • Badan • Perkerasan • Drainage • Baku - Median 					
5	640	Bangunan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> - Gedung pengadilan - Rumah pejabat Negara - Gedung DPR - Gedung Balaikota - Penjara - Perkantoran - Rumah Dinas 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	642	Bangunan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Taman kanak-kanak - SD dan Sekolah Menengah - Perguruan Tinggi - Tempat Kursus/Lembaga Pendidikan - Tempat Diklat 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	643	Bangunan Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Olah Raga - Gedung Kesenian - Gedung Pemancar 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	644	Bangunan Perdagangan <ul style="list-style-type: none"> - Pusat Perbelanjaan (Pasar, Mall, Supermarket, dept.Store) - Gedung Perdagangan - Bank - Perkantoran 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

645	Bangunan Pelayanan Umum - Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum - Gedung Parkir - Rumah Sakit / Puskesmas - Gedung Telkom - Terminal Angkutan Udara - Terminal Angkutan Air - Terminal Angkutan darat - Bangunan Keagamaan - Halte/Shelter -	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
646	Bangunan Peninggalan Sejarah - Monumen - Candi - Keraton - Rumah Tradisional - Heritage	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
647	Bangunan Industri	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
648	Bangunan Tempat Tinggal - Rumah Perkotaan <ul style="list-style-type: none"> • Inti/Sederhana • Sedang/Mewah • Rumah Susun - Rumah Pedesaan <ul style="list-style-type: none"> • Rumah Contoh - Real Estate	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis



	649	<p>Elemen Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pondasi <ul style="list-style-type: none"> • Di atas tiang - Dinding <ul style="list-style-type: none"> • Penahan beban • Tidak menahan beban - Atap - Lantai/Langit-langit <ul style="list-style-type: none"> • Suspended • Solit - Pintu/Jendela <ul style="list-style-type: none"> • Pintu Harmonik • Pintu biasa • Pintu sorong • Pintu kayu • Jendela sorong - Jendela vertical 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
6	650	<p>Tata Kota Daerah Perdagangan/Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pusat perbelanjaan - Daerah perkotaan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	651	Daerah Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	653	<p>Daerah Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan rendah - Kepadatan tinggi 				
654	Daerah Industri <ul style="list-style-type: none"> - Industri berat - Industri ringan - Industri rumah 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
655	Daerah Rekreasi <ul style="list-style-type: none"> - Taman kota - Tempat olah raga dan bermain - Ruang terbuka 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
656	Transportasi <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan - Penerangan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
657	Assainering <ul style="list-style-type: none"> - Saluran pengumpulan - Instalasi pengolahan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan • Unit Desinfektan - Unit Perpompaan 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
658	Kesehatan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - Persampahan <ul style="list-style-type: none"> • Bangunan pengumpul • Bangunan pemusnahan - Pengotoran Udara - Pengotoran Air <ul style="list-style-type: none"> • Air buangan industri - Kegaduhan/Polusi Suara 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

		- Kebersihan Kota				
7	660	Tata Lingkungan Daerah Hutan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	662	Daerah Pertanian	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	663	Daerah Pemukiman	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	664	Pusat Pertumbuhan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	665	Transportasi - Jaringan jalan - Jaringan kereta api - Jaringan sungai	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
8	670	Ketenagaan Listrik - Kelistrikan • Kelistrikan PLN • Kelistrikan non PLN - Pembangkit tenaga listrik	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> • PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) • PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) • PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas) • PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Matahari) • PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) • PLTPB (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) • PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) <ul style="list-style-type: none"> - Transmisi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> • Gardu induk/gardu penghubung/gardu trafo • Saluran udara tegangan tinggi • Kabel bawah tanah - Distribusi tenaga listrik <ul style="list-style-type: none"> • Gardu distribusi • Tegangan rendah • Tegangan menengah • Jaringan bawah tanah - Pengusahaan listrik <ul style="list-style-type: none"> • Sambungan listrik • Penjualan tenaga listrik - Tarif listrik 				
672	Tenaga Air	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	673	Tenaga Minyak	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	674	Tenaga Matahari	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	675	Tenaga Uap	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
	676	Tenaga Lainnya	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
9	680	Peralatan	Terbuka	Eselon III	Tidak mMemiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
10	690	Air Minum Intake <ul style="list-style-type: none"> - Broncaptering - Sumur - Bendungan - Saringan - Pintu air - Saluran pembawa 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none"> - Alat ukur - Perpompaan 				
692	<p>Tranmisi Air Baku</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perpipaian - Katup Udara - Katup Penguras - Bak pelepas tekanan - Jembatan pipa - Syphon 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
693	<p>Instalasi Pengelolaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Ukur - Bangunan Aerasi - Bangunan Pengendapan - Bangunan pembubuh bahan kimia - Bangunan pengaduk - Bangunan saringan - Perpompaan - Clear Hell 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis
694	<p>Distribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reservoir Menara Bawah Tanah <ul style="list-style-type: none"> • Menara • Reservoir di bawah tanah - Perpipaian - Perpompaan - Jembatan Pipa - Syphon - Hydran <ul style="list-style-type: none"> • Hydran umum • Hydran kebakaran - Katup 	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Bidang Teknis

	<ul style="list-style-type: none">• Katup udara• Katup pelepas - Bak Pelepas Tekanan				
--	---	--	--	--	--

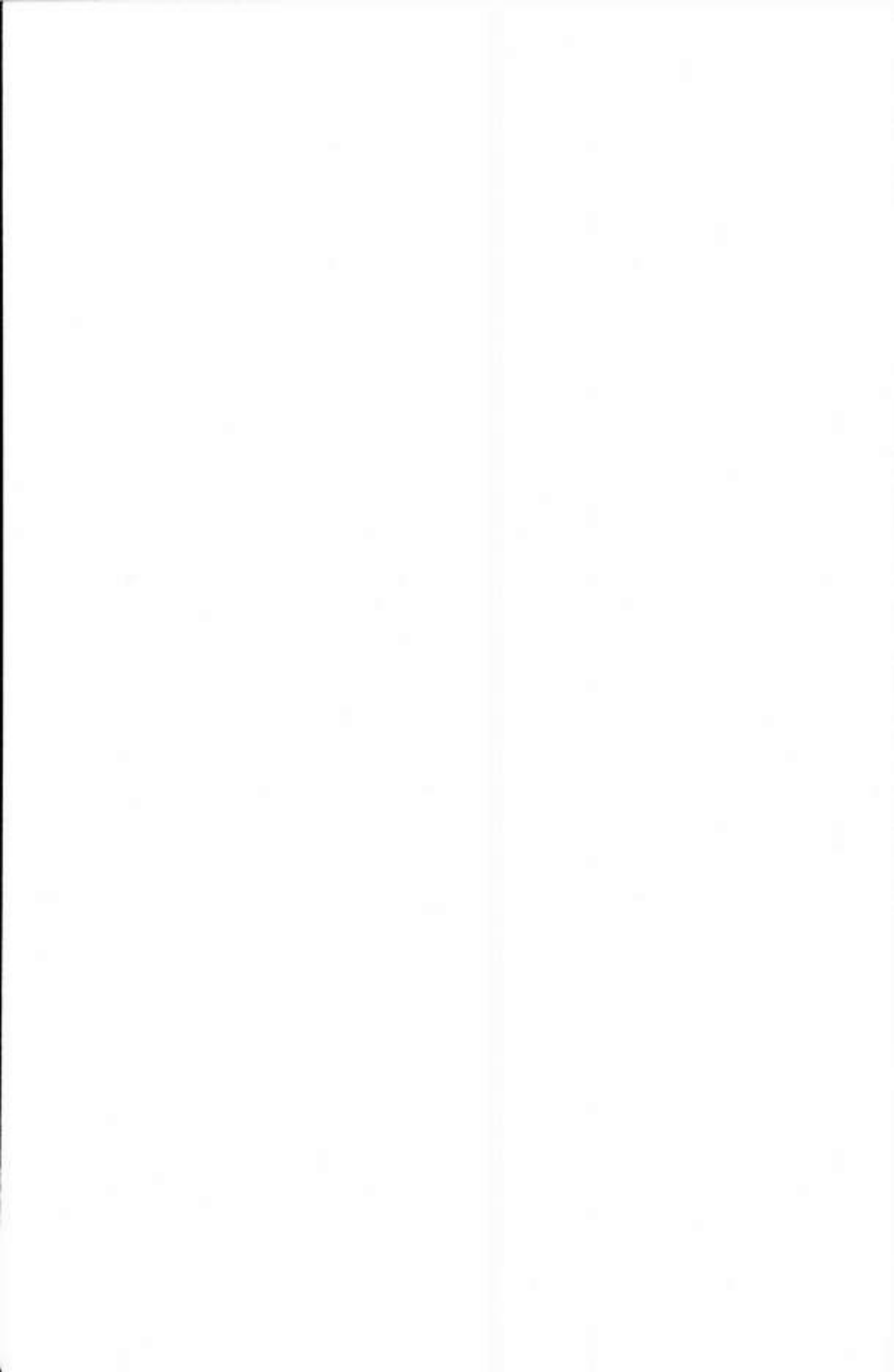
BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 KARAWANG

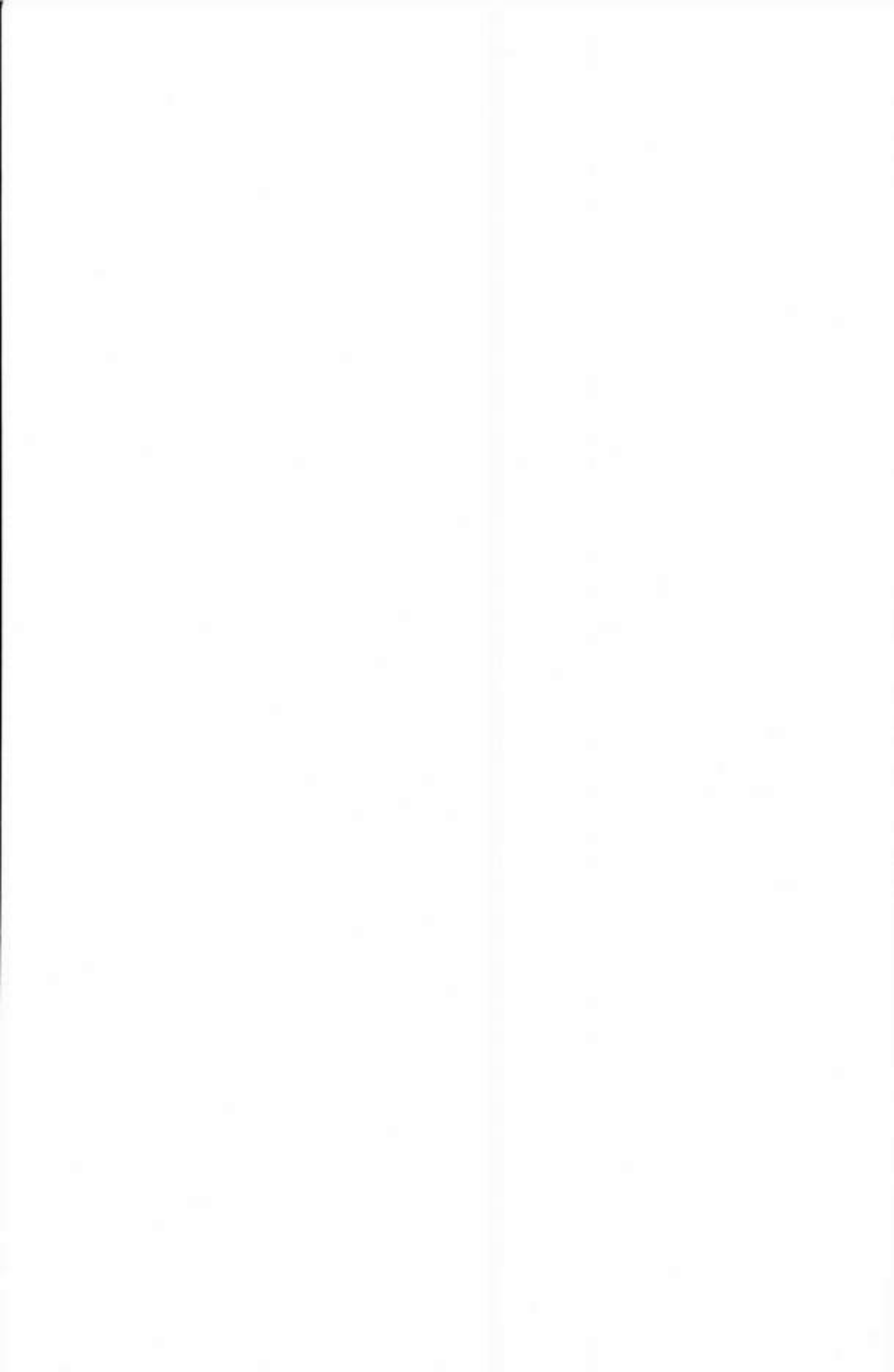
VIII. PENGAWASAN						
NO	KLASIFIKAS I	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1.	PWS	PENGAWASAN				
	700	- Monitoring, Pemeriksaan, Audit	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	701	- Bidang Urusan Dalam	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	702	- Bidang Peralatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	703	- Bidang Kekayaan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	704	- Bidang Perpustakaan/ Dokumentasi/Kearsipan/ Sandi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	705	- Bidang Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis

	707	-	Bidang Penelitian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	708	-	Bidang Konferensi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
	709	-	Bidang Perjalanan Dinas	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat Daerah Unit Kerja	Bidang Teknis
2.	710		BIDANG PEMERINTAHAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	711	-	Bidang Pemerintahan Pusat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	712	-	Bidang Pemerintahan Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	713	-	Bidang Pemerintahan Kabupaten /Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	714	-	Bidang Pemerintahan Desa	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	715	-	Bidang MPR/DPR	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	716	-	Bidang DPRD Propinsi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	717	-	Bidang DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

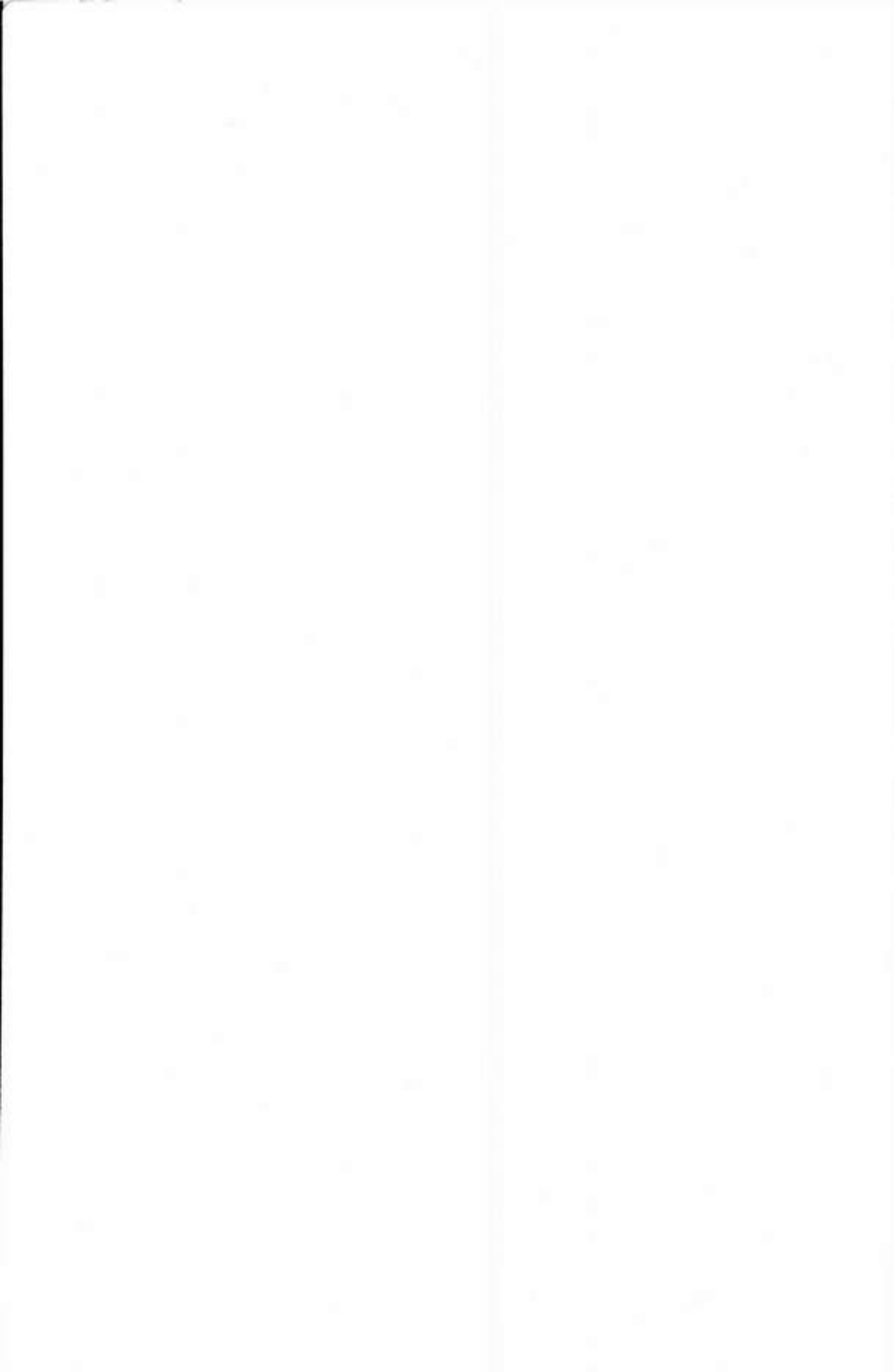


	718	-	Bidang Hukum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	719	-	Bidang Hubungan Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
3.	720		BIDANG POLITIK				
	721	-	Bidang Kepartaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	722	-	Bidang Organisasi Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	723	-	Bidang Organisasi Profesi dan Fungsional	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	724	-	Bidang Organisasi Pemuda	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	725	-	Bidang Organisasi Buruh, Tani, dan Nelayan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	726	-	Bidang Organisasi Wanita	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	727	-	Bidang Pemilihan Umum	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
4.	730		BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

	731	Bidang Pertahanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	732	Bidang Kemiliteran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	733	Bidang Perlindungan Masyarakat	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	734	Bidang Keamanan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	735	Bidang Kejahatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	736	Bidang Bencana	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	737	Bidang Kecelakaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
5	740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	741	Bidang Pembangunan Desa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	742	Bidang Pendidikan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	743	Bidang Kebudayaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis



	744	Bidang Kesehatan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	745	Bidang Agama	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	746	Bidang Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	747	Bidang Kependudukan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	748	Bidang Media Masa	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
6	750	BIDANG PEREKONOMIAN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	751	Bidang Perdagangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	752	Bidang Pertanian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	753	Bidang Perindustrian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	754	Bidang Pertambangan/ Kesamudraan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	755	Bidang Perhubungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis



	756	Bidang Tenaga Kerja	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	757	Bidang Permodalan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	758	Bidang Tentang Perbankan / Moneter	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	759	Bidang Tentang Agraria	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
7.	760	BIDANG PEKERJAAN UMUM					
	761	Bidang Pengairan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	762	Bidang Jalan	Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	763	Bidang Jembatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	764	Bidang Bangunan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	765	Bidang Tata Kota	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	766	Bidang Lingkungan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	
	767	Bidang Ketenagaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis	

	768	-	Bidang Peralatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	769	-	Bidang Air Minum	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
8	780		BIDANG KEPEGAWAIAN				
	781	-	Bidang Pengadaan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	782	-	Bidang Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	783	-	Bidang Kedudukan Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	784	-	Bidang Kesejahteraan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	785	-	Bidang Cuti	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	786	-	Bidang Penilaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	787	-	Bidang Tata Usaha Kepegawaian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	788	-	Bidang Pemberhentian Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	788	-	Bidang Pendidikan Pegawai	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis

9	790	BIDANG KEUANGAN				
	791	Bidang Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	792	Bidang Otorisasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	793	Bidang Verifikasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	794	Bidang Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	795	Bidang Perbendaharaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	796	Bidang Pembinaan Kebendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	797	Bidang Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis
	799	Bidang Perbendaharaan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Bidang Teknis


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

IX. KEPEGAWAIAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	800	KEPEGAWAIAN				
	800.1 800.2 800.04 800.05 800.07 800.08	Klasifikasi disini: Kebijakan Kepegawaian Perencanaan Penelitian Pengaduan Tim Statistik Peraturan Perundang-Undangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
2	810	PENGADAAN				
	811 811.1 811.2 811.3	Meliputi: Lamaran, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai Lamaran Testing Screening Panggilan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	812	Pengujian Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	813 813.1	Pengangkatan Calon Pegawai Pengangkatan Calon Pegawai Gol. I	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

	813.2	Pengangkatan Calon Pegawai Gol. II				
	813.3	Pengangkatan Calon Pegawai Gol. III				
	813.4	Pengangkatan Calon Pegawai Gol. IV				
	814	Pengangkatan Tenaga Lepas	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	814.1	Pengangkatan Tenaga Bulanan/ Tenaga Kontrak				
	814.2	Pengangkatan Tenaga Harian				
	814.3	Pengangkatan Tenaga Pensiunan				
3	820	MUTASI				
		Meliputi: Penangkatan, Kenaikan Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Pelimpahan Data Sering, Tugas Belajar, Wajib Militer				
	821	Pengangkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	821.1	Pengangkatan Menjadi PNS 1. Pengangkatan menjadi PNS Golongan I 2. Pengangkatan menjadi PNS Golongan II 3. Pengangkatan menjadi PNS Golongan III 4. Pengangkatan menjadi PNS Golongan IV 5. Pengangkatan menjadi PNS yang cuti di luar tanggungan negara 6. Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan				
	821.2	Berita Acara Serah Terima Jabatan 1. Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Asisten Daerah/				

		Sekretaris DPRD/Kepala Perangkat Daerah 2. Kepala Bagian/Inspektur Pembantu/Kepala Bidang 3. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi 4. Bidang/Pemeriksa 5. Camat 6. Lurah 7. Jabatan lainnya				
	822	Kenaikan Gaji Berkala	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	822.1	PNS Golongan I				
	822.2	PNS Golongan II				
	822.3	PNS Golongan III				
	822.4	PNS Golongan IV				
	823	Kenaikan Pangkat/ Pangkat/ Peningkatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	823.1	PNS Golongan I				
	823.2	PNS Golongan II				
	823.3	PNS Golongan III				
	823.4	PNS Golongan IV				
	824	Pemindahan, Pelimpahan, Pembantuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	824.1	PNS Golongan I				
	824.2	PNS Golongan II				
	824.3	PNS Golongan III				
	824.4	PNS Golongan IV				
	824.5	Lolos Butuh				
	824.6	Kurikulum dan Silabi				

	824.7	Proposal (TOR)				
	825	Data Sering dan Penempatan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	826	Penunjukkan Tugas Belajar	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	826.1	Dalam Negeri				
	826.2	Luar Negeri				
	826.3	Tunjangan Belajar				
	826.4	Penempatan Kembali				
	827	Wajib Militer/Bela Negara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	828	Mutasi dengan instansi lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	830	KEDUDUKAN				
		Meliputi: Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji, Penghargaan Ijazah, dan Jenjang Pangkat				
	831	Penghitungan Masa Kerja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	832	Penyesuaian Pangkat/Gaji	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	823.1	PNS Golongan I				
	823.2	PNS Golongan II				
	823.3	PNS Golongan III				
	823.4	PNS Golongan IV				
	833	Penghargaan Ijazah/ Penyesuaian Ijazah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

	834	Jenjang Pangkat/Esclonering	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	835	Pemakaian Gelar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
5	840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI				
		Meliputi: Tunjangan, Dana, Jaminan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi				
	841	Tunjangan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	841.1	Jabatan				
	841.2	Kehormatan				
	841.3	Kematian/Uang Duka				
	841.4	Tunjangan Hari Raya				
	841.5	Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/ Pindah				
	841.6	Keluarga				
	841.7	Pangan, Sandang, Papan (Bapetarum)				
	842	Dana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	842.1	Taspen				
	842.2	Kesehatan				
	842.3	Asuransi				
	843	Perawatan Kesehatan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	843.1	Poliklinik				
	843.2	Perawatan Dokter				

	843.3	Obat-obatan				
	843.4	Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera				
	844	Koperasi/Distribusi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	844.1	Distribusi Pangan				
	844.2	Distribusi Sandang				
	844.3	Distribusi Papan				
	845	Perumahan/Tanah	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	845.1	Perumahan Pegawai				
	845.2	Tanah Kavling				
	845.3	Losmen/Hotel				
	846	Bantuan Sosial	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	846.1	Bantuan Kebakaran				
	846.2	Bantuan Kebanjiran				
	847	Rekreasi/Olah Raga	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	848	Dispensasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
6	850	CUTI				
		Meliputi: Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Diluar Tanggungan Negara, Cuti Alasan Penting/Alasan lainnya	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	851	Cuti Tahunan				
	852	Cuti Besar				
	853	Cuti Sakit				

	854	Cuti Bersalin/Hamil				
	855	Cuti Naik Haji/Umroh				
	856	Cuti Diluar Tanggungan Negara				
	857	Cuti Alasan Penting/Cuti Alasan Lain				
7	860	PENILAIAN				
		Meliputi: Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi, dan Rehabilitasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	861	Penghargaan				
	861.1	Bintang/Satyalencana				
	861.2	Kenaikan Pangkat Sementara				
	861.3	Kenaikan Gaji Istimewa				
	861.4	Hadiah Berupa Uang				
	861.5	Pegawai Teladan				
	862	Hukuman	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang dapat mengganggu rahasia Daerah	Bidang Teknis
	862.1	Teguran Peringatan				
	862.2	Penundaan Kenaikan Gaji				
	862.3	Penurunan Pangkat				
	862.4	Pemindahan				
	863	Kondite, DP3, Disiplin PNS	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	864	Ujian Dinas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	864.1	Tingkat I				

	864.2	Tingkat II				
	864.3	Tingkat III				
	865	Penilaian kehidupan pegawai Negeri. Meliputi: Tata hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	866	Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
8	870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN				
	871	Formasi	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	872	<i>Bezetting/</i> DUK	Terbatas	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	873	Registrasi	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	873.1	NIP				
	873.2	KARPEG				
	873.3	Legitimasi/Tanda Pengenal				
	873.4	Daftar Keluarga/KP4, Perkawinan, Perceraian, Karis/Karsu				
	874	Daftar Riwayat Pekerjaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	874.1	Tanggal Lahir				
	874.2	Penggantian Nama				
	874.3	Izin Kepartaian Organisasi				
	875	Kewenangan Mutasi Pegawai	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	875.1	Pelimpahan Wewenang				

	875.2	Specimen Tanda Tangan				
	876	Penggajian	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	876.1	SKPP, SKKPS				
	877	Sumpah/Janji Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	878	Korps Pegawai	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
9	880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI				
		Meliputi: Atas Pemberhentian, Permintaan sendiri, Dengan hak pensiun, Karena meninggal dunia, Alasan lain, Dengan diberi uang pesangon, Uang tunggu untuk sementara waktu, dan pemberhentian tidak dengan hormat				
	881	Permintaan Sendiri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	882	Dengan Hak Pensiun	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	882.1	PNS Golongan I				
	882.2	PNS Golongan II				
	882.3	PNS Golongan III				
	882.4	PNS Golongan IV				
	882.5	Pensiun Janda/Duda				
	882.6	Pensiun Yatim Piatu				
	882.7	Uang Muka Pensiun				
	883	Karena Meninggal Dunia	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis

	883.1	Meninggal Dalam Tugas	Terbuka		mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja.	
	884	Alasan Lain	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	885	Uang Pesangon	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	886	Uang Tunggu	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	887	Untuk Sementara Waktu	Rahasia	Eselon II	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia Daerah	Bidang Teknis
	888	Tidak Dengan Hormat	Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu rahasia Daerah	Bidang Teknis
10	890	PENDIDIKAN PEGAWAI				
		Meriputi: Perencanaan, Pendidikan reguler, Pendidikan Non-Reguler, Pendidikan Luar negeri, Metode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas sarana pendidikan				
	891	Perencanaan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	891.1	Program				
	891.2	Kurikulum dan Silabi				
	891.3	Proposal (TOR)				
	892	Pendidikan Reguler/Kader	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis Bidang Teknis
	892.1	IPDN/APDN				
	892.2	Kursus-kursus Reguler				
	893	Pendidikan dan Pelatihan/Non Reguler	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	
	893.1	LEMHANAS				
	893.2	Pendidikan dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN,				

		SPAMA, ADUMLA, ADUM				
	893.3	Kursus-Kursus/Penataran				
	893.4	Diklat Teknik, Fungsional, dan Manajemen Pemerintahan				
	893.5	Diklat Lainnya				
	894	Pendidikan Luar Negeri	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	894.1	Berkesinambungan/berkala/bergelar				
	894.2	Non Gelar/Diploma				
	895	Metode	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	895.1	Kuliah				
	895.2	Ceramah, Simposium				
	895.3	Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi				
	895.4	Studi Lapangan, KKN, Widyaiswara				
	895.5	Tanya Jawab, Silabi, Modul, Kursil				
	895.6	Penugasan				
	895.7	Gladi				
	896	Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Nara Sumber	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	896.1	Moderator				
	897	Administrasi Pendidikan	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	897.1	Tahun Pelajaran				
	897.2					
	897.3					
	897.4	Persyaratan meliputi pendaftaran, testing, ujian				
	897.5	STTP				
		Penilaian Angka Kredit				

		Laporan Pendidikan dan Pelatihan				
	898	Fasilitas Belajar	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	898.1	Tunjangan Belajar				
	898.2	Asrama				
	898.3	Uang Makan				
	898.4	Uang Transport				
	898.5	Uang Buku				
	898.6	Uang Ujian				
	898.7	Uang Semesteran/Uang Kuliah				
	898.8	Uang Saku				
	899	Sarana	Biasa/ Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah/unit kerja	Bidang Teknis
	899.1	Bantuan Sarana Belajar				
	899.2	Bantuan Alat-alat Tulis				
	899.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya				



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 29 TAHUN 2019
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP
 DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

X. KEUANGAN						
NO	KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	901	Nota Keuangan - Berkas pengantar nota keuangan APBD perubahan	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	902	APBN	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat, Bidang
	903	APBD, RAPBD - Hibah - Bantuan Sosial	Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang
	904	Dana Alokasi Umum - Berks pengajuan - Penyusunan DAU - Laporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat, Bidang

	905	Dana Alokasi Khusus - Berkas pengajuan - Penggunaan DAK - Laporan - Dana Bagi hasil	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	906	Dana Cadangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	907	Penetapan dan prioritas plafon anggaran, penetapan prioritas anggaran sementara	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	908	Kebijakan alokasi umum, nota kesepakatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
2	910	ANGGARAN				Sekretariat , Bidang
	911	Rutin/Murni - APBD murni mulai dari perencanaan program di DPRD sampai penetapan perda APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang

912	Pembangunan/Kegiatan - Pengusulan anggaran pembiayaan/kegiatan - Penggunaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
913	Anggaran Belanja Tambahan/Anggaran Perubahan APBD - Mulai dari perencanaan sampai penetapan perubahan APBD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) - Daftar Usulan Kegiatan (DUK) - Pengusulan Pra RKA - Pengusulan RKA - Pembahasan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
915	Daftar Isian Proyek (DIP)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) - Daftar Usulan Proyek (DUP) - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
916	Revisi Anggaran/Penyempurnaan APBD - Pengusulan realisasi APBD -	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang

	917	Pembiayaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat , Bidang
	918	Belanja langsung/tidak langsung	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat , Bidang
3	920	OTORISASI/SKO/Surat Penyediaan Dana (SPD)				Sekretariat , Bidang
	921	Rutin/Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat , Bidang
	922	Pembangunan/Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat , Bidang
	923	SIAP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja dapat	Sekretariat , Bidang

	924	Ralat SKO/Revisi Surat Penyediaan Dana (SPD)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
4	930	VERIFIKASI				Sekretariat , Bidang
	931	SPM Rutin (Daftar P8)/SPM Murni, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	932	SPM Pembangunan (Daftar P8)/SPM Kegiatan, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	933	Penerimaan (Daftar P6. P7)/Pendapatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	934	SPJ Rutin/SPJ Murni	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang

	935	SPJ Pembangunan/SPJ Kegiatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	936	Nota Pemeriksaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	937	SP Pemindahan Pembukuan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
5	940	PEMBUKUAN				Sekretariat , Bidang
	941	Penyusunan Perhitungan Anggaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang

	943	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) - Neraca - Catatan anggaran laporan keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
6	950	PERBENDAHARAAN				Sekretariat , Bidang
	951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)/Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	952	Tuntutan Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	953	Penghapusan Kekayaan Negara - Aset Daerah - Aset bergerak - Aset tidak bergerak - Aset tidak berwujud	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek / PPTK dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat , Bidang

	955	Specimen Tanda Tangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	957	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
7	960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN				Sekretariat , Bidang
	961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang

	963	Laporan Keuangan Bendaharawan - Laporan keuangan bulanan - Laporan keuangan tahunan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
8	970	PENDAPATAN -Pendapatan asli daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	971	Perimbangan Keuangan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	Sekretariat , Bidang
	972	Subsidi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat , Bidang
	973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH, PBB	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat , Bidang
	974	Retribusi	terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Sekretariat , Bidang

975	Bea	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat , Bidang
976	Cukai	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat , Bidang
977	Pungutan	terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas	Memiliki dampak yang dapat mengganggu fungsi	Sekretariat , Bidang
978	Bantuan Presiden, Menteri, Bantuan Propinsi, Bantuan Pemerintah, dan Bantuan lainnya.	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	dapat mengganggu fungsi	Sekretariat , Bidang
979	Pendapatan Perusahaan Milik Negara/Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja	dapat mengganggu fungsi	Sekretariat , Bidang

9	980	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja
10.	990	BENDAHARAWAN	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja
	991	SKPP/SPP	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja
	992	Teguran SPJ	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA